

Kapitalisme Dan Islam Dalam Pergulatan Ekonomi

Yoyok Rimbawan*

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email : yoyokrimbawan@gmail.com

Abstract

The unpreparedness of human resources in the development of the state, especially the economy, has resulted in the choice of many Islamic countries being oriented and oriented towards these two main ideologies, namely the capitalist model developed by Western countries or the socialists adopted by Russia and China. As well as adopting the totality of these two ideologies as a foothold in managing human resources, natural resources in economic activities. Although both of them have principles that are not in accordance with Islamic teachings.

Keyword; *economy, capitalist, Islam*

Pendahuluan

Secara umum masyarakat muslim di seluruh dunia ditimpa keprihatinan dengan keadaan yang sedang menimpanya. Negara-negara muslim menderita kemiskinan dan keterbelakangan; meskipun sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Dari daftar 25 negara dengan neraca perdagangan tertinggi tidak satupun negara Islam di dalamnya. Begitu pula dengan 30 negara dengan indeks pembangunan manusia juga tak ada dari negara Islam. Bahkan dari 17 negara muslim yang tergabung dalam OKI sekitar 60% anak sekolah yang menikmati pendidikan SD. Sebaliknya secara umum negara-negara di luar Islam jauh lebih maju. Dalam daftar 25 dengan ekonomi terbesar di dunia menempatkan Amerika pada posisi teratas, dengan pendapatan domestik bruto sekitar US\$ 11 triliun¹. Mengapa ekonomi umat tidak dapat maju diberbagai banyak negara?

Persoalan ini diawali pada pertengahan abad 20 dimana negara-negara muslim berhasil secara fisik lepas dari penjajahan. Ketidak-siapan sumber daya manusia dalam pembangunan negara, khususnya ekonomi, mengakibatkan pilihannya bermuara pada dua falsafah pokok yaitu model kapitalis yang di

* Mahasiswa program doktor IAIN Wali Songo Semarang.

¹ Pidato Presiden RI di Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, Riyad 16 April

kembangkan oleh negara-negara Barat atau sosialis yang dianut oleh Rusia dan China. Namun kedua strategi ini telah menunjukkan kegagalan bagi kemajuan ekonomi umat dan tidak membawa kebaikan bagi kita.² Perpaduan antara kedua aspek baik kapitalis atau sosialis secara moral keduanya tidak punya arti (*morally neutral*)³

Namun demikian Uni Sovyet sebagai pendukung utama sosialis komunis mengalami kehancuran baik dalam ekonomi dan politik pada akhir-akhir abad 20. Periode inilah yang sekaligus mengakhiri pembangunan model sosialis, dan seluruh dunia beralih pada kapitalis. Kestabilan politik dan kemajuan ekonomi di USA, Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong telah membuktikan keunggulan idiologi ini dibanding dengan keterpurukan politik dan ekonomi di Eropa Timur, USSR, Cina, Korea Utara dan Vietnam. Demokrasi menjadi tema sentral dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan Francis Fukuyama meramalkan bahwa akhir dari sejarah bangsa (*the end of history*) liberalis, kapitalis dan demokrasi. Kebebasan berekspresi dan aktualisasi diri di tengah heterogenitas pendapat dan kepentingan dalam masyarakat bisa terwadahi dalam bingkai mazhab ini. Selanjutnya kebenaran akan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat yang secara otomatis akan menghendaki 'kebaikan' bersama. Begitu pula prestasi ekonomi yang diraih oleh negara-negara Barat pendukung kapitalis.

Kemenangan model pembangunan kapitalis tidak lepas dari kesiapannya sejak awal perang dunia kedua telah meletakkan dasar dasar yang kuat dengan cara mengintegrasikan dan menata perdagangan bebas. Kapitalisme menjadi motor penggerak dalam memobilisasi perekonomian dunia. Arus barang, jasa dan uang terintegrasi secara global dalam tatanan ekonomi dunia baru (*new world economic order*). Banyaknya gedung bertingkat, volume perdagangan dan sibuknya lalulintas perdagangan melalui darat, laut dan udara cukup menunjukkan pegerakan ekonomi dunia. Kemenangan kapitalis membuat negara industri sebagai pusat (*center*) atau metro polis, sedangkan negara berkembang sebagai pinggiran

2006 Majalah Tempo, 7 Mei 2006.

² Khurshid Ahmad, "*Economic Development in an Islamic Framework*", dalam *Studies in Islamic Economics* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1980), 172-173.

³ M. Umar Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Peranannya Di Bidang Ekonomi" dalam

(*periphery*). Namun bila kita kritis, kerugian besar justru diderita oleh negara miskin dan berkembang. Ketidak-siapannya SDM dalam persaingan bebas mengakibatkan pelarian modal keluar, terperangkap hutang (*debt trap*) dan kerusakan lingkungan.⁴

Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalis⁵; *Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi*,⁶ Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya, *Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar*, Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. *Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus*, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, hal ini merupakan warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).

Untuk melihat perkembangan ajaran kapitalisme saat ini, mari kita buka kembali analisis yang diajukan Karl Marx untuk dapat memahami fenomena tersebut. Ada dua teori penting dari Karl Marx yang perlu kita fahami bersama:⁷

1. Surplus labor and value theory

Etika Ekonomi Politik, Ed. Ainur R. Shophian (Surabaya, Risalah Gusti, 1997), 29.

⁴ Dibentuknya lembaga World Bank (1946) dan IMF (1947) di Bretton Wood, selanjutnya melalui UNDP (*UN Development Progres*) membentuk SAP (*Structure Adjustment Program*) yang memaksakan model pembangunan dengan membuka pasar dalam negeri sehingga menciptakan kemiskinan yang dirasakan Negara-negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Laporan UNDP menunjukkan 20% Negara terkaya dan 20% Negara termiskin semakin jauh. Tahun 1960 rasionya 30:1, tahun 1970 rasio 32:1, tahun 1980 rasio 45:1 dan tahun 1989 rasio menjadi 59:1. Lihat Anwar Ibrahim, "*Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat*", dalam, "Negara", 67

⁵ Semboyan kapitalisme "*Laissez Faire et Laissez passer, le monde va de lui meme*" (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri) lihat Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta : Penerbit Aribu Matra Mandiri, 1997), h 70 dalam buku Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), h 30

⁶ Para ahli hukum Romawi cenderung untuk mempertimbangkan bahwa tiap warga negara memiliki hak melakukan sesuatu yang ia sukai atas hak milik pribadinya. Konsepsi tentang hak milik pribadi itu bukan sekedar untuk menikmatinya, tetapi juga kebebasan untuk menggunakan seenaknya sendiri atau merusaknya lihat A.A Islahi, *Konsep Ekonomi : Ibn Taimiyah*, ter.H. Anshari Thayib (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), 130

⁷ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997 lihat juga Paul Heinz Koesters, *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia Pemikiran - pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita*, Gramedia, Jakarta 1987

Dalam membangun teorinya, Marx berangkat dari pandangan **nilai** (*value*) terhadap barang dan jasa menurut Adam Smith dan David Ricardo. Nilai suatu barang itu diukur dari seberapa banyak **tenaga** yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk memproduksi barang tersebut. Selanjutnya Marx melihat bahwa dengan adanya perubahan pola produksi dari sistem yang primitif kepada sistem yang modern, maka akan muncul **ketidakadilan** dalam ekonomi. Dalam pola produksi **modern**, yang bekerja adalah buruh-buruh perusahaan. **Majikan** sebagai pemilik perusahaan, kenyataannya tidak pernah terlibat dalam proses produksi. Akan tetapi, majikanlah yang menikmati seluruh **keuntungan** yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu tenaga para buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen **biaya produksi**. Sesuai dengan teori ekonomi kapitalisme, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, maka salah satu metodenya adalah dengan **menekan** biaya produksi seminimum mungkin. Jika nilai barang itu diukur dari besarnya tenaga yang telah dikorbankan, maka sesungguhnya telah terjadi **surplus nilai tenaga buruh** yang telah diambil oleh majikannya. Dengan demikian, ekonomi kapitalisme adalah ekonomi yang sangat **dzalim** terhadap kaum buruh dan menjadi surga bagi para kapitalis.

2. *The law of capital accumulations*

Menurut Marx, dalam persaingan yang bebas, perusahaan yang besar akan senantiasa “**memakan**” perusahaan yang kecil. Oleh karena itu, jumlah **majikan** akan semakin berkurang, sebaliknya jumlah kaum buruh akan semakin banyak. Demikian juga, jumlah perusahaan yang besar juga akan semakin sedikit, namun **akumulasi kapitalnya** akan semakin besar. Jika jumlah buruh semakin banyak, maka akan berlaku hukum **upah besi** (*the iron wages law*). Dengan demikian, nasib kaum buruh akan semakin **tertindas** sedangkan para kapitalis akan semakin ganas dan serakah. Analisis yang dikemukakan oleh Marx memang masih terlalu sederhana untuk ukuran perkembangan ekonomi kapitalisme saat ini. Sebab, perkembangan kapitalisme global di abad mutakhir ini sudah semakin canggih dan kompleks.

Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya sampai pada pemerasan kaum buruh dan pencaplokan pengusaha kelas *teri*, namun keserakahan mereka sudah menerobos dan menjarah di banyak sektor yang lain, bahkan dengan dukungan berbagai fasilitas dan lembaga yang mereka ciptakan sendiri. Berbagai sektor maupun lembaga yang mereka ciptakan tersebut diantaranya adalah⁸

a. Sektor keuangan

Kaum kapitalis tidak hanya ingin membesar, tetapi mereka juga ingin membesar dengan **cepat**. Caranya ialah dengan menciptakan **lembaga perbankan**. Fungsi utamanya adalah untuk mengeruk dana masyarakat dengan cepat, sehingga dapat segera mereka manfaatkan untuk menambah modal perusahaannya agar bisa menjadi cepat besar. Ternyata keberadaan lembaga perbankan ini masih dianggap belum cukup, mereka terus mengembangkan kreatifitasnya. Akhirnya ditemukanlah ide untuk menciptakan sebuah pasar yang unik, yang selanjutnya mereka namakan sebagai **pasar saham**. Dengan adanya pasar ini, mereka dapat dengan mudah untuk melempar kertas-kertas sahamnya agar dibeli masyarakat, sehingga mereka segera mendapatkan gelontoran modal yang mampu untuk membuat perusahaan mereka menjadi cepat menggurita.

b. Sektor kepemilikan umum

Nafsu kapitalisme tidak akan pernah mengenal kata “cukup”. Mereka tidak pernah ingin berhenti. Mereka tidak hanya ingin berhenti untuk untuk bermain di wilayah pasar hilir saja, tetapi mereka terus merangsek untuk mencaplok sumber-sumber ekonomi di wilayah hulu. Dengan dalih kebebasan ekonomi dan kebebasan pasar, mereka juga ingin menguasai wilayah-wilayah ekonomi yang seharusnya menjadi milik umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Wilayah ekonomi yang ingin terus mereka kuasai tersebut misalnya adalah berbagai macam sektor pertambangan, sumber daya hutan, sumber daya air, minyak bumi, gas, jalan raya, pelabuhan, bandara dsb.

⁸ Dwi Condro Triono, Makalah Seminar dengan tema “*Islam dan Tantangan Ekonomi Global*” Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta. Tanggal 22 Mei 2007

c. Sektor kepemilikan Negara

Jika mereka sudah banyak menguasai sektor kepemilikan umum, maka bagi kaum kapitalis tetaplah belum dianggap cukup. Mereka kemudian melirik kepada perusahaan-perusahaan yang banyak dimiliki oleh Negara. Dengan dalih demi efektivitas dan efisiensi perusahaan, mereka akan mendorong perusahaan milik Negara tersebut untuk *go public*, dengan jalan *melego* sahamnya ke pasar, dengan harga yang murah tentu saja.

Untuk memahami apakah sebuah negara itu bercorak kapitalisme ataukah sebaliknya yaitu sosialisme, maka indikator yang paling mudah untuk digunakan adalah dengan melihat seberapa besar pihak-pihak yang menguasai sektor ekonominya. Jika sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh swasta, maka negara tersebut cenderung bercorak kapitalisme dan sebaliknya, jika ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara, maka lebih bercorak sosialisme.⁹

Dengan menggunakan tolok ukur di atas, kita dapat menelusuri sejauh mana cengkeraman kapitalisme telah menjalar ke Indonesia. Sesungguhnya jejak kapitalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Bulan Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi ideologi komunis.

Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA dan hutang luar negeri mulai meningkat. Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium *Inter-Government Group on Indonesia* (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah *semikapitalisme*.¹⁰

⁹ Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., *Mikroekonomi*, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta, 1999.

¹⁰Tulus Tambunan, *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, Lembaga Penerbit

Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. dari kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, kita dapat berasumsi bahwa ada sebuah *mainstream* sistem ekonomi telah dipilih atau telah ‘dipaksakan’ kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri.¹¹

Masa pembangunan ekonomi Orde Baru-pun akhirnya berakhir. Puncak dari kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju libelarisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu:¹²

1. Dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (*floating rate*). Sesuai dengan kesepakatan dalam *LoI* dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (*fix rate*). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar.
3. Privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1998.

¹¹ Didik J Rachbini, *Republika* 27 Juni 2001

¹² Dwi Condro Triono, Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema “Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia” Fakultas Teknik

adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan “dijualnya” BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal.

4. Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk “kubangan” liberalisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.

Pergulatan kapitalis dan Islam

Islam tidak berhenti dan berada di luar realitas kehidupan manusia, tetapi masuk keseluruhan segi kehidupan masyarakat muslim, baik individu maupun sosial bersifat unik.

Islam dan kapitalisme adalah dua entitas yang berbeda. Namun dalam kenyataannya, keduanya dapat hidup berdampingan meskipun masing-masing saling curiga, keduanya saling terbuka untuk berinteraksi dan bergulat pada tataran nilai, ekonomi dan budaya.

Ada banyak kemungkinan (*possibilities*) yang terjadi dalam sebuah pergulatan. Mungkin; Islam mempengaruhi kapitalisme, Islam dipengaruhi kapitalisme atau Islam dan kapitalisme saling mempengaruhi. Maka yang sebenarnya tengah terjadi adalah Islamisasi kapitalisme atau kapitalisme kultur Islam. Yang pada akhirnya pergulatan itu akan melahirkan sosok *muslim kapitalis* atau sosok *kapitalis muslim*.

Hal ini karena Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Faktanya bahwa masyarakat Islam di suatu wilayah dengan yang lainnya tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam. Islam telah memberi peluang kepada pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing, sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip universalnya.

Menuju Ekonomi Syariah.

Di sekitar akhir tahun 1960-an dan awal 1970, kesadaran kesadaran negara-

negara muslim mulai meningkat.¹³ Di tengah pergumulan tawaran model pembangunan ekonomi dari blok kapitalis dan sosialis, menggugah umat untuk mencari alternatif yang datang dari ajaran Islam¹⁴. Pada akhirnya dibentuklah Konferensi Internasional Ekonomi Islam untuk pertama yang diadakan di Makkah 21-26 Februari 1976 (atau Safar 21-26, 1396), yang dihadiri oleh 200 ahli ekonomi dan ulama di seluruh dunia. Dimana Dr. Muhammad Omar Zubair sebagai presidennya, dan Prof. Khurshid Ahmad adalah salah satu wakil presiden konferensi ini. Sebagai konsekuensinya dibentuklah *Internatinal Centre For Researce In Islamic Economies* tahun 1977 di Jumada al-Thani.¹⁵

Gayung bersambut semangat untuk terus mengembangkan keilmuan Islam dibarengi dengan menerapkan praktek praktek bisnis yang diatur menurut syari'ah Islam. Kesadaran ini tidak terlepas dari tiga alasan, yaitu: (1) penduduk muslim seperlima dari penduduk dunia, jumlah yang teramat besar bila ditinjau -dari pangsa produsen dan jaringan konsumen; (2) umat Islam kebanyakan berdiam di berbagai bumi yang sangat kaya akan sumber daya alam; (3) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan produktivitas masyarakat muslim dunia melalui syari'ah Islam.¹⁶

Saat ini tidak boleh lagi ada anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Dan pembangunan (*an obsticle to economic growth*). Kita harus membuktikannya bahwa ekonomi syariah dapat menjamin keadilan, kesejahteraan dan kejayaan. Perhatian ekonomi umat tidak hanya difokuskan pada zakat, shadaqah dan infaq yang selama ini menjadi pilar utama, tetapi juga pembangunan menyeluruh yang menyangkut keadilan, pemerataan, pendirian lembaga keuangan syariah dan

¹³ Tahun 1969 terbentuk Konprensi Tingkat Tinggi / KTT Islam pertama di Marokos sebagai reaksi pembakaran masjid al-Aqsa di baitul makdis. Yang turut dalam KTT ini baru 22 negara. Bersamaan dengan itu pula juga membantu OPEC, kerana negara-negara Islam berlimpahan petro dolar. Lihat Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 6.

¹⁴Metode pembangunan ekonomi tidak hanya terpaku pada dua sistem ekonomi yang telah kita kenal, yakni kapitalisme dan sosialisme, tetapi ada satu lagi sistem ekonomi Islam dimana ia akan memimpin masa depan . ..hal senada juga dikatakan oleh loui Garder dalam bukunya *La Cite Muslumane*, dan Raymond Charles dalam bukunya *Droit Musulmane* didalam Muhammad Syauqi al Fanjari, *al Madzab al Iqtishadi al Islamiy* (Jeddah : Syirkah Maktabah 'Ukkaz, 1981), h 87

¹⁵ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*.,xvii-xxii.

¹⁶ M. Karebet Widjayakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Managemen Syari 'at*

pemberdayaan ekonomi umat.¹⁷

Prinsip Ekonomi Syariah.

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap ekonomi Islam. Khursid Ahmad memberi dasar-dasar filosofis ekonomi Islam yaitu; (1) *tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya dan alam, (2) *rububiyah*, meletakkan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam (3) *khalifah*, menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini, meliputi sebagai muslim dan sebagai anggota dari umat. Dari Konsep ini lahirlah konsep perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip – prinsip lainnya. (4) *tazkiyah*. misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan Negara¹⁸, sehingga semua aktivitas seluruh kegiatan ekonomi dilandasi oleh kejujuran dan keadilan.

Konsep ekonomi dalam Islam tidak hanya tampak dalam konsepsi global, namun juga tercermin dalam praktek-praktek aplikatif aktivitas ekonomi. Cermin ini harus menjadi kesatuan dengan kebijakan politik ekonomi yang diambil dan dianut dalam masyarakat walaupun terdapat persamaan dengan sistem ekonomi yang lain (non Islam), namun dalam sistem ekonomi Islam tetap terdapat perbedaan pandangan dengan sistem ekonomi non Islam.¹⁹

Dari berbagai pandangan di atas secara umum sistim ekonomi dalam Islam memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibanding ekonomi kapitalis. Adapun

(Jakarta- Khairul Bayan, 2003), 6.

¹⁷ Dibentuklah Konfrensi-Internasional Ekonomi Islam pertama, yang diadakan di Mekka, 21-26 Pebruari 1976 (atau Safar 21-26, 1396), yang dihadiri oleh 200 ahli ekonomi dan ulama di seluruh dunia. Dimana DR. Muhammad Omar Zubair sebagai presidennya dan Prof Khursid Ahmad sebagai salah satu wakil presidennya. Khursid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework*, dalam *Studies in Islamic Economics* (Leicester, U.K.; The Islamic Foundation, 1980), 172-173.

¹⁸ Khursid Ahmad, *Membangun Ekonomi dalam Perspektif Islam*, dalam *Etika Ekonomi Politik*, Ed. Ainur R Shophian (Surabaya, Risalah Gusti, 1997), 13

¹⁹ Abdu llah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj M. Irfan Syofani (Yogyakarta, Megistra Insania Press, 2004), xxi

karakteristik yang membedakannya adalah²⁰:

- a. Bersumber dari Tuhan dan agama. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua muslim tanpa kecuali. Sistem ekonomi Islam mempunyai keunggulan sebagai sistem ekonomi yang dijamin dengan hukum-hukum agama yang diwujudkan dalam aturan halal dan haram. Dengan begitu keseluruhan aktivitas ekonomi memiliki garis aturan yang ditetapkan oleh syari'ah. Sebagai muslim kegiatan ekonomi dianggap juga sebagai bagian dari ibadah,
- b. Ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Dengan begitu ekonomi Islam ada pada posisi tengah antara aliran individualis (kapitalis) yang memandang bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, sedangkan aliran sosialis (komunis) justru menyatakan ketidakadaan hak individu dan mengubahnya menjadi kepemilikan bersama dengan menempatkan dibawah dominasi negara. Islam memperkuat posisi individu dan haknya dalam kepemilikan. Namun Islam juga membangun relasi individu dengan masyarakat, dimana ada kepemilikan harta pribadi yang menjadi hak yang lainnya. Dengan demikian keseimbangan dalam ekonomi Islam mencakup kebutuhan duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, serta individu dan masyarakat. Instrumen yang dipakai untuk pemerataan dan keseimbangan adalah bahwa ada sebagian harta milik individu yang harus dikeluarkan; seperti zakat infaq, dan shadaqah.
- c. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam menjadikan manusia menjadi fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai wakil Allah di bumi untuk kemakmuran. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang fokus perhatiannya adalah kekayaan. Islam telah

²⁰ Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj M. Irfan Syofani (Yogyakarta, Megistra Insania Press, 2004), 15-20. Lihat pula M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*, (Leicester, The Islamic Foundation and The International of Islamic Thought, 1992), 209. Lihat pula Muhammad Najatullah Siddiqi, *Moslem Economics Thinking* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1988), 5.

mewajibkan negara untuk memberikan jaminan kepada semua anggota masyarakat berupa jaminan kebutuhan pokok bagi seluruh warga. Umar bin Abdul Azis pernah mengatakan bahwa seorang muslim harus mendapatkan rumah, alat Bantu yang mempermudah pekerjaannya dan senjata sebagai pertahanan dari serangan musuh. Jaminan sosial dalam Islam yaitu jaminan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan individu serta menuntut adanya pemenuhan lebih luas yang mencerminkan kesetaraan dalam hidup. Islam merekatkan jaminan ini dalam persaudaraan antara kaum muslim (*ukhuwah Islamiyah*), untuk menunjukkan bahwa hal itu bukan semata mata bagian hirarkis yang hanya untuk saling mengisi, tetapi juga *ukhuwah Islamiyah* dimana yang satu dengan yang lain saling menjamin. Jaminan sosial juga menyangkut keamanan terhadap hak semua masyarakat dalam mengakses sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keadilan²¹ bisa dicontohkan adalah dengan menolak sistem riba atau bunga; karena pihak kreditor yang meminjamkan dananya tidak mau rugi yang penting dapat hasil bunga.

- d. Komitmen pada moral (akhlak atau etika). Ekonomi Islam tidak hanya berjalan dengan hukum – hukum sebagai prinsip, tetapi juga mengedepankan moral atau akhlak. Seperti tidak mengurangi timbangan, bersifat amanah, mengutamakan kejujuran, tidak berani mengambil harta yang bukan haknya atau korupsi dan sebagainya. Hal in, disamping menjaga kesucian hati, juga ikatan solidaritas social dan jalinan bisnis dapat merasa aman dan terpelihara.
- e. Ekonomi Islam bersifat Universal. Hal ini dapat dipahami karena kaidah-kaidah syari'ah bersifat baku dan sampai akhir jaman. Kebakuan ini karena mengandung nilai-nilai, yang menjunjung tinggi moral (fitrah),

²¹Ibn Taimiyyah berkata " Allah menyukai negara adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai negara meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, dan tidak akan bertahan dengan ketidak-adilan meskipun Islam" lihat Taqiyyudin Ahmad ibnu Taimiyyah, *al Hisbah fi al Islam*, di tahkik oleh Said Muhammad ibn Abi Sa'dah (Kuwait : Maktabah Dar al Arqam, 1983), h 94

keadilan dan keseimbangan serta ibadah sebagai pengamalan kesadaran bertuhan; Sehingga sifat ekonomi Islam yang universal ini dapat melintasi negara dan segala jaman.

Kesimpulan

- a. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi, membuat banyak negara yang berpenduduk mayoritas Islam berkiblat pada madzab Kapitalisme, tentu ada sisi positif dan juga sisi negatif yang ditawarkan,
- b. Pergulatan Kapitalisme dan Islam bisa berbentuk internalisasi dan eksternalisasi,
- c. Dalam pergulatan tersebut sosok individu dan masyarakat Islam harus mengetahui konsep ekonomi Syariah (ekonomi Islam) dan memanfaatkan sebagai alat dan media dalam aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi, *Konsep Ekonomi :Ibn Taimiyah*, ter.H. Anshari Thayib , Surabaya : Bina Ilmu, 1997
- Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj M. Irfan Syofani, Yogyakarta, Megistra Insania Press, 2004
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997
- Didik J Rachbini, *Republika* 27 Juni 2001
- Dwi Condro Triono, Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema “*Dilema Pembangunan Bidang Ketechnikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia*” Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001
- Dwi Condro Triono, Makalah Seminar dengan tema “*Islam dan Tantangan Ekonomi Global*” Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta. Tanggal 22 Mei 2007
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengemlar* , Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1980
- Khursid Ahmad, *Etika Ekonomi Politik*, Ed. Ainur R Shophian, Surabaya, Risalah Gusti, 1997
- M. Karebet Widjayakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Managemen Syari'at*, Jakarta- Khairul Bayan, 2003

- M. Umar Chapra, *Etika Ekonomi Politik*, Ed. Air.r R. Shophian, Surabaya, Risalah Gusti, 1997
- M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*, Leicester, The Islamic Foundation and The International of Islamic Thought, 1992
- M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999
- Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Aribu Matra Mandiri, 1997
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 2004
- Muhammad Najatullah Siddiqi, *Moslem Economics Thinking*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1988
- Muhammad Syauqi al Fanjari, *al Madzab al Iqtishadi al Islamiy*, Jeddah : Syirkah Maktabah 'Ukkaz, 1981
- Paul Heinz Koesters, *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia Pemikiran - pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita*, Gramedia, Jakarta 1987
- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., *Mikroekonomi*, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta, 1999.
- Taqiyyudin Ahmad ibnu Taimiyyah, *al Hisbah fi al Islam*, di tahkik oleh Said Muhammad ibn Abi Sa'dah, Kuwait : Maktabah Dar al Arqam, 1983
- Tulus Tambunan, *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1998.